

**Ekonomi Politik Agama: Otokritik Pendekatan Empirik-Posivistik**Mukhijab<sup>1</sup><sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Corresponding author: mukhijab1966@gmail.com

Received : Januari 2021; Accepted: Maret 2021 ; Published : Mei 2021

**Abstract**

*In religion studies, the empirical-positivistic perspective continues to be the prima donna. Although it incorporates a variety of perspectives, including anthropology, phenomenology, sociology, psychology, and a normative-textual approach, it is oriented toward understanding the phenomenon of belief in religion and interfaith relations from normative perspectives - doctrinal, historical-empirical, and philosophical criticism. As a result, there is a challenge in developing critical science in religious studies, as existing approaches are dominated by normativist perspectives (scientific-objectivism). Rachel M. McCleary and Robert J. Barro pioneered a political economy approach to religion, focusing on the study of religious, economic, and political enthusiasm in relation to the role of religious groups and the state in actualizing the religious economy. This level of study is classified as Keynesian political economics, as it presupposes the urgency of denominational intervention or denominational religious institutions in order to give birth to forms of religious regulation that underpin the economic activities of their members and government regulations that regulate religious organizations and economic policy. Their level of study has not yet progressed to critical analysis; it remains mired in empirical and dense economic and political studies with quantitative analysis. In the context of religious studies in Indonesia from a political economy perspective, the offer should be expanded upon in order to develop a critical political and political economic perspective geared toward overcoming religious organizations' and the state's dominance in regulating the affairs of religious adherents. This is critical for the advancement of the research of religious life in Indonesia.* Keywords: Empirical-Positivistic, Political Economy, Religion, Critical

**Abstrak**

Perspektif empiris-positivistik masih menjadi primadona dalam studi agama. Meskipun berbagai perspektif telah diterapkan di dalamnya seperti antropologi, fenomenologi, sosiologi, psikologi, dan pendekatan normatif-tekstual, orientasi pendekatan ini memahami gejala kepercayaan dalam agama dan hubungan antar agama, dari aspek normatif - doktrinal, historis-empiris , serta kritik filosofis, ada masalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang kritis dalam studi keagamaan karena pendekatan-pendekatan yang ada cenderung didominasi oleh pendekatan teologis normatif, subyektif (fideistik-subjektivisme) dan apologis (klaim kebenaran), serta studi ilmiah dan obyektif tentang sejarah agama (ilmiah-objektivisme). Rachel M. McCleary dan Robert J. Barro memperkenalkan pendekatan ekonomi politik terhadap agama, yang menekankan studi tentang antusiasme agama, ekonomi, dan politik dalam hal peran kelompok keagamaan dan negara dalam aktualisasi ekonomi penganut agama. Tingkat studi ini dapat dikategorikan sebagai pendekatan ekonomi politik Keynesian, yang mengandaikan urgensi intervensi denominasi atau lembaga keagamaan

denominasi untuk melahirkan bentuk peraturan agama yang mendasari kegiatan ekonomi anggota organisasi mereka dan peraturan pemerintah untuk mengatur organisasi keagamaan dan kebijakan ekonomi. Level studi yang mereka tawarkan belum mencapai pada tahapan studi kritis, masih terjebak dalam studi ekonomi dan politik yang empiristik dan kental dengan analisis kuantitatif. Dalam konteks studi agama di Indonesia dengan pendekatan ekonomi politik, maka tawaran itu perlu disentuh lebih lanjut untuk menciptakan perspektif ekonomi politik agama yang kritis yang berorientasi untuk mematahkan dominasi organisasi keagamaan dan negara dalam mengatur urusan para pengikut agama. Ini strategis dan penting dalam konteks memajukan studi tentang kehidupan beragama di Indonesia.

Kata kunci: empirik-positivistik, ekonomi politik, agama, kritis

## PENDAHULUAN

Rachel M. McCleary dan Robert J. Barro menggagas “pendekatan baru” dalam studi agama. Dalam konteks ini, penulis menamakan perspektif yang ditawarkan berorientasi pada pendekatan ekonomi politik (*political economic perspective*) dalam studi agama. Apakah tepat pendekatan ini untuk memahami apa yang disebut mereka religiusitas individu (*individual religiosity/IR*)? Kalau tidak tepat, apa yang menjadi fokus studi?

Kedua penulis buku mendeteksi beberapa problematika dalam meneliti substansi spiritualitas dengan perspektif ekonomi politik, “Apakah wajar seseorang yang ingin memahami bagaimana kecenderungan dan kepercayaan agama orang lain untuk menggali informasi dan menjawab pertanyaan bagaimana kita memahami kepercayaan, ritual, dan organisasi keagamaan? Kemudian bagaimana kita sebagai peneliti dalam memahami fenomena keagamaan?”

Menurut mereka, IR adalah kekuatan internal –spiritualitas dan aktualisasi nilai-nilai agama—dalam kehidupan sehari-hari pemeluk agama. Karakter IR adalah kekuatan nilai-nilai (spiritual) yang mapan dalam kehidupan sehari-hari pada diri seseorang. Dalam studi ekonomi, mereka mengajak peneliti untuk memahami bagaimana religiusitas individual, keanggotaan dalam organisasi agama, dan peran organisasi agama dan negara dalam mendinamisasi ekonomi dan politik pemeluk agama, dan bagaimana efek kemajuan ekonomi yang didorong oleh organisasi agama dan negara terhadap religiusitas pemeluk agama (mikro) dan religiusitas suatu negara (makro), sebagaimana mereka sampaikan dalam *The Wealth of Religions The Political Economy of Believing and Belonging*, dan *Religion and Economy* (McCleary and Barro 2006, 2019).

Siapa mereka? Rachel M. McCleary adalah dosen di *the Economics Department, Harvard University*, dosen tamu di *American Enterprise Institute*, dan *Research Fellow at the Hoover Institution, Stanford University*. Pengalamannya dalam studi ekonomi politik agama dan pendekatan interdisiplin ilmu (Agama, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi) ditekuni sejak studi master studi teologi (*Theological Studies*) di Candler School of Theology,

Emory University dan doktoral filsafat moral (moral philosophy) di University of Chicago).

Robert J. Barro meraih gelar ekonomi dari Harvard University dan sarjana fisika dari Caltech, menjadi dosen di universitas tersebut, serta dosen tamu di the American Enterprise Institute, anggota lembaga riset *the National Bureau of Economic Research*, dan anggota editor jurnal *Harvard's Quarterly Journal of Economics*, *Presiden of the Western Economic Association*, dan Wakil Presiden *the American Economic Association*.

Pertemuan dua penulis terjadi di *American Enterprise Institute*, dan sukses dalam merajut kerjasama yang produktif, dengan menerbitkan sejumlah karya ilmiah bersama antara lain "*Protestant Competition is Good for Saints.*" *American Enterprise Institute*, 2017, "*Saints Marching In, 1590-2012*, *Economica*, 2016, "*Private Voluntary Organizations Engaged in International Assistance, 1939-2004.*" *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 37, no. 2 (2008). Kemudian "*Religion and Political Economy in an International Panel*", *Journal for the Scientific Study of Religion* (2006), "*Which Countries Have State Religions?*" *Quarterly Journal of Economics* (2005), "*Religion and Economic Growth*," *Milken Institute Review* (2004), bersama Jason Hwang menulis "*Religious Conversion in 40 Countries*," *Journal for the Scientific Study of Religion* (2010).

Perspektif ekonomi politik agama yang digagas McCleary dan Barro menjadi tantangan sekaligus kritik terhadap studi agama yang mendasarkan pada perspektif teologis, dengan karakter apologi, studi bersifat normatif, yang merujuk pada pengetahuan dan metodologi empiris positivistik dalam kajian ilmu-ilmu pasti (sain). Perspektif itu yang populer saat ini adalah ekonomi politik kritis dari kalangan Marxian, yang menempatkan pengetahuan secara dialogis, berbasis pada ilmu sosial kritis dengan karakter abduktif kritis, parsipatoris dan emansipatoris. Karakter emansipatoris sepintas sejenis dengan posisi peneliti sebagai pemeluk agama, tetapi prinsipnya sangat berbeda. Ekonomi politik cenderung menempatkan pengetahuan secara objektif-kritis, keberpihakan peneliti untuk membongkar dan mengkritisi ketimpangan sosial yang dipicu oleh nilai-nilai dan ideologi tertentu yang dikonstruksi dan ditafsirkan sepihak oleh elit dominan. Sedang perspektif sain menempatkan agama sebagai keyakinan dan disposisi peneliti sebagai pemeluk, simpatisan, posisinya tidak berjarak antara kapasitas pemeluk agama dengan disposisi sebagai peneliti. Yang terjadi, ilmuan dengan perspektif sain positivistik melainkan membela nilai-nilai agamanya sendiri (apologi) (Hardiman 2009).

Dalam konteks studi agama dan ilmu sosial lain di Indonesia, pemahaman tentang gagasan perspektif ekonomi politik studi agama dari McCleary dan Barro sangat relevan, dengan harapan agar partisipan pendekatan studi agama berkembang pemikirannya sejalan dengan dinamika ilmu pengetahuan, dan menyadari studi agama perlu menerapkan multi perspektif dan lintas disiplin untuk mencapai kemajuan pengetahuan.

## MEMAHAMI EKONOMI POLITIK

Menurut Agus Sudibyo, ekonomi politik absen sebagai pendekatan studi ilmu-ilmu sosial di Indonesia dalam waktu lama. “Kebangkitan” peneliti untuk menerapkan pendekatan ekonomi politik didorong oleh perubahan sistem politik otoriter ke demokrasi pada 1998, yang memicu kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan kritis dan berorientasi pada perubahan sosial (Sudibyo 2000).

Yustika (2014) membagi tiga varian pendekatan ekonomi politik yaitu ekonomi politik klasik/neo klasik (*classical/neoclassical political economy*), ekonomi politik Keynesian (*Keynesian political economy*), dan ekonomi politik Marxian (*Marxian political economy*). Ekonomi politik klasik memahami bahwa seluruh kegiatan ekonomi diorganisasikan oleh pasar, pemerintah hadir secara terbatas, hanya dalam distribusi pendapatan. Kemudian ekonomi politik neoklasik menempatkan individu dan korporasi sebagai agen yang harus memilih dan mendominasi pasar. Maka negara perlu hadir untuk mengatasi monopoli, oligopoli sebagai efek dari kegagalan pasar dalam mengatasi regulasi pasar. Ekonomi politik Keynesian berpandangan, negara perlu hadir dalam kegiatan ekonomi untuk mencegah krisis ekonomi ketika pasar gagal mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Sedang ekonomi politik Marxian sebagai antitesa atas pendekatan pasar dan pendekatan negara yang dominan, maka rekomendasi Marx agar masyarakat sipil terutama kelas pekerja melakukan revolusi untuk mengambil-alih kekuasaan rezim, dengan pendekatan revolusi maupun evolusi seperti mereka berpartisipasi dalam partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, kontestasi politik.

Substansi pendekatan ekonomi politik di atas adalah, studi dan penelitian ilmu sosial harus memahami inter-relasi di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, pasar, harga, konsumsi) dan berbagai dampak yang terjadi di dalamnya seperti ketimpangan sosial, dominasi kekuasaan. Orientasi studi dan penelitian ini adalah peka terhadap praktik dominasi kekuasaan dan ketidakadilan sosial, bukan sebaliknya *pro-developmentalisme* dan *status quo* (Sudibyo, 2000). Corak studi demikian mulai tampak dalam kajian media, yang menggugat struktur ekonomi dalam hubungannya dengan sistem politik. Studi Ilmu Komunikasi dan Sosiologi Media sangat responsif terhadap pendekatan ini, sekedar contoh Eriyanto, *Konsentrasi Kepemilikan Media dan Ancaman Ruang Publik* (Eriyanto, 2008), Sulhan, *Kisah Kelabu di Balik Maraknya Pers Lokal di Kalimantan* (Sulhan, 2006), Agus Sudibyo, *Kebebasan Semu Penjajahan Baru di Jagat Media, Media dan Politik Lokal, Profesionalisme Media dalam Liputan Pilkada* (Sudibyo 2009, 2010), Mukhijab, *The Political Games of Media Investor and the Effects of Democracy Health* (Mukhijab et al. 2020).

Sejumlah kajian agama yang tema dan analisisnya mengarah ke perspektif ekonomi politik sempat diekspresikan oleh para penulis luar maupun dalam negeri dalam karya-karya yang dipublikasikan oleh Jurnal Ummu Quran dan

Pesantren pada 1990-an. Meskipun pendekatan ekonomi politik belum dijadikan sebagai metodologi, tema-tema kajian dan analisisnya mengarah ke pendekatan ekonomi politik, contoh karya-karya para pakar yang diterbitkan oleh Ulumul Quran seperti William McInner: *Agama di Abad Duapuluh Satu* (McInner, 1990), Hasan Hanafi: *Asal Usul Konservarisme Modern dan Fundamentalisme Islam* (Hanafi, 1990). Kemudian karya-karya dipublikasikan Jurnal Pesantren oleh M. Habib Chirzin, *Tradisi Pesantren dari Harmonitas ke Emansipasi Sosial* (Chirzin 1988), Abdurrahman Wahid *Paradigma Pengembangan Masyarakat melalui Pesantren* (Wahid, 1988), Soetjipto Wirosardjono dalam *Dakwah Potensi Dalam Kesenjangan* (Wirosardjono, 1987), Moeslim Abdurrahman *Pendidikan Agama yang Membebaskan* (Abdurrahman, 1987), M. Ridlwan Lubis dalam *Syura di Masa Dulu dan Refleksi Kini* (Lubis, 1987).

Kajian semacam itu dalam sistem kekuasaan otoriter waktu itu merupakan terobosan studi ilmu sosial, khususnya studi dalam pemikiran agama (Islam). Masalahnya, tema-tema demikian tidak terlalu banyak diminati oleh para mahasiswa di universitas Islam karena tema-tema populer itu memerlukan kajian lintas disiplin maupun metodologi kontemporer dan kritis. Selain itu, mahasiswa dekade 1990-an bermasalah dengan visi internal universitas dan para pembimbing/promotor yang waktu itu sebagian besar berpikiran konservatif dan resisten dengan isu-isu yang berorientasi ekonomi politik.

Saat itu, pendekatan-pendekatan studi agama yang populer mendasarkan pada pemahaman agama dengan perspektif sejarah, antropologi, fenomenologi, psikologi, dan pendekatan normatif-tekstual. Menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut, orientasi studi dan penelitian agama mengarah pada strategi memahami gejala-gejala kepercayaan-kepercayaan dalam agama-agama dan hubungan antar agama, dari aspek normatif-doktrinal, historis-empiris, maupun kritik filosofis. Objek kajian dan penelitian soal pengalaman keagamaan manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupannya. Terdapat problem dalam kajian agama yang didominasi oleh konflik pendekatan teologis yang normatif, subyektif (*fideistic-subjectivism*) dan apologis (*truth claim*) dengan sejarah agama yang bersifat ilmiah dan obyektif (*scientific-objectivism*). Dalam bahasa Richard C. Martin, sikap peneliti kurang agresif dalam membantu memahami agama dan budaya masyarakat (Huda, 2002; Zaenuddin, 2013).

Dalam sikap peneliti agama yang konservatif, apakah perspektif ekonomi politik bisa menjadi alternatif studi dan penelitian agama di Indonesia? Mengingat pendekatan ini memahami persoalan yang berhubungan erat dengan ekonomi dan politik, memandang sistem nilai bermuatan ideologi, dan memiliki hubungan kekuasaan (McNair, 2003; Mcquail, 2011; Mosco, 2009), apakah sikap kritis bisa diekspresikan dalam studi agama? Darimana harus mulai studi dan penelitiannya?

## EKONOMI POLITIK AGAMA: MCCLEARY DAN BARRO

Bagaimana McCleary dan Barro memahami pendekatan ekonomi politik agama? Dalam *The Wealth of Religions, The Political Economy of Believing and Belonging* (McCleary and Barro, 2019), mereka berpendapat, ekonomi politik agama adalah memahami bagaimana agama memiliki relevansi dengan religiusitas dan dinamika ekonomi pemeluk dan bagaimana politik negara (kebijakan institusi negara dan institusi keagamaan) memengaruhi religiusitas dan dinamika ekonomi pemeluk agama. Atau, agama memiliki interaksi dua arah dengan ekonomi politik. Di satu sisi studi agama harus memahami dan menjawab pertanyaan, bagaimana perkembangan ekonomi dan lembaga-lembaga politik mempengaruhi partisipasi dan kepercayaan agama. Bahan dasar dalam ekonomi agama adalah, para pemeluk agama secara sistematis dan sengaja berusaha untuk mencapai tujuan mereka berdasarkan pilihan rasional berlaku dan kegiatan itu untuk (atas nama pelaksanaan ajaran-ajaran) agama. Di sisi lain, studi agama perlu memahami dan menjawab pertanyaan, bagaimana religiusitas mempengaruhi karakteristik individu, seperti etos kerja, kejujuran dan penghematan, dan dengan demikian memengaruhi kinerja ekonomi, dan bagaimana kebijakan negara memengaruhi regulasi agama dan religiusitas serta produktivitas (kerja dan ekonomi) pemeluknya (McCleary and Barro, 2006).

McCleary dan Barro mencoba untuk memahami dimensi religiusitas dan dampak produktivitas ekonomi, dan memahami dimensi regulasi negara yang memiliki agama resmi (baca= agama negara atau agama mayoritas warga di suatu negara yang berpengaruh terhadap perspektif dan kebijakan pemangku negara) dan religiusitas pemeluk agama tertentu.

Menurut mereka, pintu masuk objek studi ekonomi politik agama adalah pemahaman tentang sekularisasi. Istilah ini di kalangan Protestan menjadi titel sebuah gerakan Reformasi Abad Pertengahan, sebagai respon atas dominasi agama yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat maupun dalam birokrasi pemerintahan, yang berdampak pada terjadinya kerusakan etika maupun pemikiran konservatif tentang agama. Maka istilah ini dikonotasikan sebagai antitesis terhadap agama atau pemberontakan terhadap otoritas Tuhan. Dalam perkembangannya, makna sekularisme terdapat aktualisasi dunia untuk mencapai sukses dengan menggunakan berbagai cara, sebagai bagian dari jalan mengikuti jalan Tuhan (Lukmana, 2017), yang merupakan ekspresi atas pengakuan dosa-dosa yang dilakukan pada masa lalu.

Aktualisasi sekularisme dalam ajaran John Calvin tentang pengaturan kegiatan ekonomi untuk kepentingan para pemeluk agamanya misalnya tentang transaksi dan bunga bank untuk kepentingan komersial, yang ditetapkan berdasarkan fatwa atau doktrin agama dan dilegitimasi oleh kebijakan atau regulasi perbankan dari pemerintah. Sekularisasi tidak terbatas pada perilaku personal, terdapat pola sekularisasi yang dikaitkan dengan intervensi pemerintah terhadap apa yang disebutnya pasar agama (*market religion*), yang terdiri dari 1). Regulasi pemerintah terhadap pasar agama atau bagaimana efek

religiusitas dengan adanya intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan agama misalnya intervensi pemerintah dalam pemilihan pimpinan agama atau intervensi ekonomi pemerintah dalam bentuk subsidi anggaran terhadap organisasi agama. 2). Pembangunan ekonomi dan religiusitas atau memahami bagaimana kemajuan ekonomi negara dan efeknya terhadap religiusitas pemeluk agama. Terdapat asumsi, negara-negara kaya kurang religius daripada negara yang miskin, dan religiusitas warga dan negara makin jatuh ketika negara menjadi kaya atau makmur dari segi ekonomi. Dalam hal ini yang ditekankan studi tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan religiusitas. Misalnya sektor pendidikan, terdapat hipotesis bahwa warga terpelajar, keluarga mapan ekonomi, sekolah formal, cenderung mengedepankan logika ilmiah, menolak ajaran-ajaran mistik (*ghoib*), dan cenderung tidak religious (McCleary and Barro, 2019).

Mereka mengenalkan kajian ekonomi politik dalam tajuk agama dan pertumbuhan ekonomi dengan perspektif agama-agama samawi (Katholik, Protestan, Islam, Yahudi) dan agama ardhhi (Budha dan Hindu). Dalam mengantarkan kajian itu, McCleary dan Barro menjelaskan tentang pemikiran Weber, Marthin Luther, John Calvin, John Wesley, yang dipadukan dengan data tentang agama dan ekonomi modern. Meskipun perspektif ekonomi politik menjadi gagasan studi mereka, pemahaman mereka dipadu dengan analisis data kuantitatif (*statistic*). Menurut mereka, data kuantitatif bisa mengantarkan pada penemuan bahwa pertumbuhan ekonomi merespons positif keyakinan agama yang lebih tinggi (soal neraka dan surga), tradisi membaca bersama kitab agama meningkatkan angka melek huruf. Makin tinggi melek baca, itu mendorong perkembangan ekonomi.

Menurut mereka, terdapat kajian khusus tentang Islam dan pertumbuhan ekonomi. Dari perspektif sejarah, wilayah geografis Islam dan penemuan ilmiah unggul pada abad 10 disertai pencapaian spektakuler ekspansi militer ke sejumlah negara pada sampai abad ke-16. Sebaliknya ekonomi negara-negara Muslim cenderung terjun bebas sejak Revolusi Industri mulai abad ke-17. Mengutip Lewis (1993), mereka berarguman bahwa Muslim mundur sebagai efek dari pendidikan konvensional (*madrasah/pesantren*) yang tidak mendidik pemikiran kritis dan penilaian independen, para peserta didik sibuk dengan hafalan, terlalu bergantung pada pada teks-teks klasik, dengan sedikit paparan ide-ide dan inovasi baru.

Dalam menekankan perspektif ekonomi politik, McCleary dan Borro menegaskan tentang pendekatan lintas disiplin ilmu. Klaimnya bahwa mereka menggunakan interdisipliner, dengan strategi menggabungkan prinsip-prinsip ekonomi dengan sosiologi, antropologi, sejarah, geografi, teologi, dan filsafat. Dengan kata lain, McCleary dan Boro ingin mengatakan bahwa studi agama yang dikembangkan tidak ingin terjebak dalam tirani keilmuan maka studi agama dalam perspektif ekonomi politik sebagai konteks genesis saja, adapun operasional kajian, pendekatan keilmuan tidak bisa berdiri sendiri (Siregar

dalam Narendra 2008). Studi ilmu sosial bersifat *incompatibility thesis* (IT), yang menekankan menggabungkan teori, paradigma dan metode (kuantitatif dan kualitatif) (Howe, 1988). Kajian ilmu memerlukan berbagai gagasan, simbol, argument dan narasi (Kellner, 2010).

## **PENGARUH WEBER**

Agama dalam perspektif ekonomi dan politik maupun perspektif ekonomi politik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran sosiolog Max Weber dalam *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* yang mendalami hubungan antara etika asketif Protestan dan spirit kapitalisme modern atau membahas tentang agama, etos kerja, dan ekonomi atau tesis tentang semangat kapitalisme kaum Protestan. Demikian halnya pemikiran McCleary dan Barro, terkesan kuat pengaruh dari pemikiran Weber dalam menjelaskan kinerja ekonomi anggota denominasi. Hal yang berbeda pemikiran dua pakar tersebut dengan Weber adalah soal agama negara. McCleary dan Barro menjadi kajian utama soal akselerasi antara kemajuan pembangunan dan kinerja ekonomi pemeluk agama, hal demikian tidak menjadi materi kajian Weber.

Menurut Weber, praktik-praktik ekonomi kapitalis merupakan hasil dari gagasan-gagasan dari doktrin agama Protestan. Alasannya, sistem agama dan ekonomi bukan dua hal yang benar-benar berbeda, justru keduanya seolah-olah selaras dan sebangun serta batas antara nilai-nilai dua sistem tersebut tidak begitu jelas. Satu sistem dengan sistem lainnya menentukan karakter, sifat, peran, dan saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan pranata lain dalam masyarakat yang membentuk masyarakat. Pembuktian premis tersebut dilakukan dalam penelitian di kampung-kampung {distrik} mayoritas warga pemeluk Protestan dan distrik-distrik yang warganya mayoritas pemeluk Katholik di Eropa. Hasilnya, aktivitas ekonomi distrik Protestan lebih dinamis dan produktif serta berorientasi pada industrialisasi. Semangat “protestanisme” tersebut terbentuk melalui pepaduan antara semangat asketis dan materialis atau semangat duniawi dan ukhrawi. Jiwa kapitalisme mereka, tumbuh dari proses menjadikan hakikat moral dalam fatwa-fatwa agama tentang ekonomi. Maka mengumpulkan uang, kapitalisasi modal, merupakan tujuan ketimbang kebutuhan atau hajat hidup. Maka mencapai hidup sepenuhnya (sukses duniawi) adalah legal dan dianjurkan dalam Protestan, sebagai bagian dari aktualisasi atau bentuk ketaatan kepada nilai-nilai industri di dunia. Sikap materialistik tersebut bukan identik sekedar menumpuk uang, melainkan bagian dari ketaatan kepada nilai-nilai industrialisasi yang menjadi bagian dari misi sistem ekonomi kapitalis. Maka pemeluk Protestan yang bekerja dan pengembangan industri diposisikan sebagai bentuk membumikan nilai-nilai agamanya atau mengamalkan nilai-nilai agamanya (King and Cuzzrort, 1987).

McCleary dan Barro menyampaikan pandangan mereka bahwa religiusitas dan denominasi atau organisasi agama menentukan orientasi dan semangat personal maupun kelompok terhadap nilai-nilai dan praktik kapitalisme. Weber



menyoal beban ekonomi sebagai anggota organisasi sosial (denominasi, ormas) keagamaan berpengaruh terhadap semangat meraih sukses ekonomi anggota jamaah, maka McCleary dan Barro mengamini pandangan tersebut. Kongregasi atau keanggotaan pada baptis dan gereja kenamaan memiliki prestise moral dan penjaminan kondite untuk masa depan jalan hidup anggota jamaah. Anggota kongregasi menentukan kualitas-kualitas yang diperlukan dalam urusan bisnis, atau keanggotaan kelompok agama yang populer dan orientasi nilai-nilai agama dan ekonominya maju menjadi selebar sertifikat kualifikasi moral bisnis individual. Maka menjadikan keanggotaan dalam denominasi atau organisasi agama menjadi tipikal kesadaran tentang kenaikan sosial anggota jamaah menuju kelas menengah enterpreuner atau pengusaha apabila mayoritas jamaah sebagai pengusaha. Maka keberagamaan seseorang bukan sebatas soal ketaatan terhadap nilai-nilai agama, lebih dari itu, bagaimana keberagamaan itu menjadi bagian dari etos kerja (disiplin gereja) dalam semangat kapitalisme. Demikian halnya kenaggotaan dalam denominasi atau ormas, karakter anggota menentukan pengaruh sosial, ekonomi, dan prospek status sosial. Ketika orang menjadi anggota denominasi yang mayoritas anggotanya bukan pengusaha, maka tidak ada jaminan jamaah mengalami proses inisiasi menjadi pengusaha yang sukses (Weber, 2009).

Aktualisasi atau eksternalisasi nilai-nilai agama dalam meraih sukses ekonomi dibimbing oleh tradisi asketisme yang dipelopori reformer Perancis John Calvin, dan ajarannya sering dilabel Calvinisme. Prinsip hidup dalam ajaran ini, penganut Protestan harus bekerja baik, dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memenuhi kewajiban yang dititahkan kepada manusia. Kerja adalah *beruf, calling* (panggilan) atau kerja bukan sebatas memenuhi kewajiban untuk mendapat nafkah (penghasilan), praktik merupakan intensifikasi pengabdian agama yang diekspresikan dalam kegairahan kerja, sebagai panggilan suci, yang menjamin orang masuk dalam paket keselamatan. Praktik kerja menjadi semangat kapitalisme tercermin dalam nilai-nilai rajin, hemat, rasional, efisien, menahan diri. Orang yang bisa menjalankan nilai-nilai tersebut merupakan orang terpilih. Cara pandang Weber tersebut menjadi metode yang disebut *verstehen* atau memahami makna di balik peristiwa sosial dan historis dalam semangat yang mendasari tindakan ekonomis yang bercorak kapitalis (Abdullah, 1988).

McNair (2009) dalam membahas elemen-elemen ekonomi politik media mengembangkan lima pilar pendekatan ini yaitu ekonomi, politik, organisasi, teknologi, dan budaya. *Pertama*, pilar ekonomi bahwa *out put* aktivitas organisasi/perusahaan/institusi tertentu dipengaruhi oleh struktur organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, pilar politik bahwa proses kerja dan hasil kerja organisasi/perusahaan/institusi ditentukan oleh kekuatan (kekuasaan) eksternal). *Ketiga*, organisasi bahwa institusi menolak/resisten terhadap intervensi deterministik dari eksternal. *Keempat*, pilar teknologi bahwa teknologi berpengaruh terhadap kinerja organisasi/perusahaan, dan *terakhir*

pilar kultural bahwa proses kerja dan hasil kerja organisasi/perusahaan/institusi dipengaruhi oleh berbagai elemen (ekonomi, politik, teknologi, dan budaya). Menurut Agus Sudibyo, lima pilar tersebut bisa disederhanakan menjadi tiga sudut pandang pendekatan yaitu pendekatan ekonomi politik yang membaca proses kerja organisasi/perusahaan/institusi yang dipengaruhi oleh ekonomi dan politik eksternal, pendekatan organisasi yang memahami organisasi/perusahaan/institusi tertentu memengaruhi kekuatan eksternal, dan pendekatan kulturalis yang memahami bahwa proses kerja organisasi/perusahaan dipengaruhi dan memengaruhi kekuatan eksternal (Sudibyo, 2000).

### **KRITIK: EKONOMI POLITIK EMPIRIK-POSITIVISTIK?**

Sekedar untuk menegaskan bahwa pemahaman McCleary dan Barro tentang ekonomi politik agama sangat dipengaruhi oleh pemikiran Weber tentang agama, etos kerja, dan perkembangan ekonomi. Meskipun mengantarkan pentingnya studi dominasi atau institusi agama dan negara, pemahaman dominan tentang ekonomi politik lebih menekankan pada perilaku pemeluk agama dan korelasinya dengan dinamika ekonomi individual (mikro) maupun ekonomi masyarakat (makro) dalam suatu negara. Aspek pendapatan per kapita pemeluk agama (GDP) dipahami sebagai dampak (pengaruh) disiplin dan kerja keras mereka. Sementara pada level negara, religiusitas dan kemajuan ekonomi dipengaruhi oleh dinamika pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dan pengaruh intervensi pemerintah terhadap pemilihan pemimpin agama atau kebijakan pemerintah terhadap dinamika organisasi agama. Aktualisasi pemeluk agama dalam profesinya masing-masing dan intervensi pemerintah dalam pembangunan ekonomi berpengaruh pada religiusitas. Pemeluk agama tertentu makin kaya, maka religiusitasnya (seperti pergi ke gereja, ke masjid) cenderung menurun. Maknanya orang makin mapan secara ekonomi bisa makin menjauh dari agama. Demikian halnya peran negara. Ketika pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah makin maju dan ekonomi nasional mencapai stabilitas, religiusitas pemerintah dan warganya makin menurun. Dalam konteks semacam itu, perspektif ekonomi politik McCleary dan Barro bisa dikategorikan unik. Ketika para penganut faham kritis makin jauh meninggalkan analisis kuantitatif untuk membaca relasi kekuasaan dan ketimpangan kekuasaan, sebaliknya McCleary dan Barro meneguhkan pentingnya metode kuantitatif dalam kajian ekonomi politik yang cenderung dihindari oleh para peneliti yang menggunakan kerangka pikir ekonomi politik kritis.

Dalam penjelasan bagian pendahuluan bukunya, dia mengatakan dengan menggunakan analisis kuantitatif data modern, kami menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi merespons positif keyakinan agama yang lebih tinggi — terutama yang terkait dengan neraka dan surga — ketika diukur relatif terhadap

partisipasi keagamaan (diukur terutama dengan kehadiran di layanan keagamaan formal).

“...kami berpikir bahwa kepercayaan itu penting (secara positif) sebagian besar dengan mempromosikan sifat-sifat seperti upaya kerja dan penghematan, seperti ditekankan oleh Weber. Kami berpendapat bahwa partisipasi sangat penting (negatif) karena mewakili konsumsi sumber daya dan juga proksi untuk regulasi ekonomi dan hukum yang negatif. Saluran efek lainnya adalah bahwa tekanan Protestan pada pembacaan Alkitab secara individu menyebabkan tingkat melek huruf yang lebih tinggi dan, dengan demikian, mendorong perkembangan ekonomi”.

Dengan adanya penekanan dimensi studi kuantitatif terhadap agama, terdapat pertanyaan yang perlu didiskusikan, apakah studi agama yang ditawarkan McCleary dan Barro bisa dikategorikan ekonomi politik agama atau studi ekonomi dan politik agama?

Young (2009) membaca McCleary dan Barro dalam dua hal: 1). Mereka mengikuti pandangan tentang pertumbuhan ekonomi dan religiusitas pengikut Protestan yang menjadi tesis Weber, sekaligus menambahkan perspektif baru tentang religiusitas dan kemajuan ekonomi jamaah tidak terbatas pada penganut agama tertentu (Protestan), agama-agama lain memiliki semangat serupa dengan ajaran Calvinisme. Jadi, semua agama besar dunia, setidaknya dalam teks-teks suci, memuji kebajikan sosial dari kerja keras, berhemat, dan kejujuran. Karena itu soal religiusitas dan dampak ekonomi bukan soal perbedaan ajaran Protestan versus Katolik, Budha atau Muslim atau Konfusian, elemen yang tepat antara religius versus tidak beragama, beriman versus tidak beriman. Maknanya, kemakmuran ekonomi anggota organisasi agama atau jamaah agama tertentu tergantung pada norma-norma sosial dan moral yang religius. “Ini adalah argumen McCleary dan Barro, yang tidak pernah dibahas oleh Weber,” kata Young.

2) Pemikiran tentang studi ekonomi politik agama dari McCleary dan Barro menghadirkan sisi lain soal pendekatan kuantitatif (statistic). Dalam memahami religiusitas suatu negara yang menganut agama resmi, keduanya membaca kinerja religiusitas yang berkaitan dengan dinamika ekonomi, dan regulasi pemerintah menggunakan teknik-teknik statistik seperti regresi, variabel instrumental, sesuatu metode yang jarang digunakan dalam studi sosiologi modern dan postmodern serta kritis. Metode ini mengingatkan studi-studi sains yang mengikuti metode penelitian empirik-positivistik.

Persoalan lain yang disorot menyangkut sekularisasi sebagai pintu masuk kajian ekonomi politik agama. Faccarello (2017) berpendapat, sekularisasi lebih banyak dipahami sebagai pemisahan agama dan negara atau regulasi agama dan regulasi publik (negara) sebagaimana diekspresikan dalam pemikiran para pakar di negara-negara Barat. Menggunakan konsep sekularisasi dalam ajaran John Calvin (Protestan), menurut pandangannya sebagai langkah yang rumit karena

terminologi istilah ini multi-pengertian dan tafsir. McCleary dan Barro secara tersirat memahami bahwa sekularisasi merupakan aktualisasi nilai-nilai agama dalam regulasi kebijakan dan praktik ekonomi para pemeluk. Penggunaan sekularisasi cenderung tidak universal ketika konsep itu dikaitkan dengan agama tertentu. Karena itu Paccarelo berpendapat, ekonomi politik agama belum menemukan bentuk yang mapan, bahkan, menyebut cenderung tidak memiliki bentuk pendekatan serupa dalam ekonomi politik liberal.

## CATATAN PENUTUP

Dalam kajian ekonomi politik yang disinggung di atas, Yustika (2014) mengategorikan beberapa varian ekonomi politik dari klasik hingga Marxian dan fokus perhatiannya. Ekonomi politik klasik mendoiktrinasi bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus diorganisasi oleh pasar atau rezim pasar harus mengatur seluruh proses dan dinamika transaksi ekonomi. Negara boleh campur tangan dalam ruang terbatas pada tugas distribusi barang konsumsi. Kemudian ekonomi politik neoklasik menekankan bahwa individu sebagai rezim pengendali ekonomi atau individu sebagai *constrained choice* dalam bidang ekonomi, dan bisa menciptakan kekuatan ekonomi personal yang bersifat monopoli maupun oligopoli. Tugas negara adalah membuat regulasi untuk mengelola agar kekuatan sumber daya ekonomi tidak terpusat pada segelintir individu. Sedang ekonomi politik Keynesian menempatkan negara sebagai rezim regulator ekonomi untuk mencegah eksploitasi sumber daya ekonomi masyarakat, dan peran negara mencegah ekonomi jangan sampai masuk jurang krisis. Intervensi negara terhadap ekonomi sebagai keharusan. Adapun ekonomi politik Marxis dominasi ekonomi pasar (ekonomi liberal yang dikendalikan para kapitalis) menciptakan ketimpangan sosial terutama ketimpangan antara pemilik modal dan tenaga kerja. Agar terjadi pemerataan produksi dan distribusi sumber daya ekonomi, perlu dilakukan perjuangan untuk mengubah dominasi kapitalis melalui strategi revolusi kekuasaan, dan agenda ekonomi politik melalui kelompok kepentingan, partai politik, dan gerakan sipil lainnya.

Dari varian ekonomi politik ilmu sosial tersebut, perlu dipetakan pada posisi mana studi ekonomi politik agama yang digagas oleh McCleary dan Barro? Dua penulis tersebut membaca peran religiusitas individu dan pengaruh nilai-nilai agama dalam kegiatan ekonomi, peran denominasi (organisasi agama) dalam regulasi nilai-nilai agama untuk aktualisasi kepentingan duniawi para anggotanya, dan peran negara dalam regulasi yang berkaitan dengan institusi agama seperti pemilihan pimpinan agama yang sesuai keperluan pemerintah, dan dampak pembangunan ekonomi dan sektor lain terhadap religiusitas agama. Fokus studi itu dalam perspektif ekonomi politik klasik tidak bersesuaian karena mereka mengandaikan ekonomi politik tidak bebas nilai atau tidak menganut sepenuhnya sistem pasar. Terdapat di dalamnya peran representasi kepentingan yaitu organisasi agama (denominasi) dan negara. Dari institusi denominasi lahir bentuk-bentuk regulasi agama untuk landasan kegiatan

ekonomi anggota organisasinya dan regulasi pemerintah untuk mengatur organisasi agama serta intervensi kebijakan ekonomi mengarah pada perspektif ekonomi politik Keynesian. Ketika perspektif ekonomi politik pada level tersebut, maka McCleary dan Barro memahami sinergi religiusitas dan ekonomi memerlukan dukungan regulasi dari organisasi agama, dan intervensi negara, dengan mengabaikan kritik terhadap dominasi kelompok kepentingan (organisasi agama) dan negara. Dari pemahaman sederhana ini, maka ekonomi politik Marxian masih belum masuk perhitungan McCleary dan Barro. Agar mencapai pada tingkatan ekonomi politik kritis, proses pengetahuan memerlukan pemahaman kritis untuk menyoal, menggugat dominasi peran organisasi agama dalam manajemen ekonomi umat atau rekonstruksi nilai-nilai agama menurut perspektif organisasi agama maupun evaluasi peran negara dalam mengendalikan agama dan organisasi keagamaan.

Agar mencapai perspektif ekonomi politik kritis, penelitian agama memerlukan revolusi pendekatan kajian agama, dari paradigm positivistik, paradigm konstruktivis ke paradigma kritis, dari pendekatan agama secara normative-apologis ke pendekatan agama secara objektif-kritis. Dari tiga pendekatan ilmu sosial, yaitu positivism, interpretatif, dan sains sosial kritis, maka studi dan penelitian agama lebih dominan pada dua pendekatan awal.

Apakah studi agama memiliki kapasitas untuk melihat semua permukaan yang ilusi untuk membongkar struktur yang sebenarnya dalam dunia material, dengan tujuan untuk mengubah kondisi (dominasi institusi agama) dan membangun dunia dengan perspektif baru, yang kritis? Agar sampai pada tahap kritis tersebut, maka penelitian agama perlu melakukan kritik dan transformasi hubungan sosial dalam ruang agama, organisasi agama, dan negara. Dimensi pemahaman yang deterministik (positivism) dan voluntaristik (interpretatif), perlu ditingkatkan ke level pemahaman kritis (Neuman, 2014).

Apakah gagasan McCleary dan Barro tentang pendekatan ekonomi politik agama bisa menjadi model studi agama? Terdapat problem mendasar dari segi paradigm ekonomi politik yang mereka kembangkan. Penulis berasumsi bahwa studi agama memerlukan pendekatan ekonomi politik kritis untuk mengikuti dinamika ilmu pengetahuan. Dalam mencapainya, terdapat tantangan khusus. *Pertama*, pendekatan kritis menempatkan masyarakat dalam sistem kelas, yang mengalami situasi biner antara dominasi dan subordinasi. Elit dominan menjadi arus utama yang mendominasi struktur sosial dan peran dalam masyarakat, sementara pendekatan empiris melihat masyarakat sebagai sistem sosial tunggal dan bebas memainkan peran, individu saling berinteraksi selaras, apabila terjadi konflik bisa mencapai harmoni (ekuilibrium) pada suatu saat. *Dua*, studi empiris melihat keamanan dan stabilitas kekuasaan sebagai indikator positif perkembangan masyarakat, sementara studi krisis justru mempertanyakan keamanan dan mengkritik kekuasaan, serta membatasi kekuasaan (Sudibyo, 2000). Dalam kajian McCleary dan Barro, peran elit dominan dan organisasi keagamaannya sangat sentral dan vital untuk

memberdayakan ekonomi warga. Begitu juga peran negara diposisikan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mapan secara ekonomi. Agar efektif peran negara, maka McCleary dan Barro mewacanakan negara wajar mengintervensi organisasi agama dengan alasan kepentingan masyarakat supaya mereka lebih sejahtera. Tidak ada rekomendasi dari mereka bahwa dominasi peran organisasi agama dan negara perlu dikritisi dan dilucuti. Karena epistemologi ekonomi politik McCleary dan Barro sangat konservatif, maka model ekonomi politik mereka memerlukan sentuhan pengetahuan untuk modifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1988. *Agama, Etos Kerja, dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Abdurrahman, Moeslim. 1987. "Pendidikan Agama yang Membebaskan." *Pesantren* 6(2).
- Chirzin, M. Habib. 1988. "Tradisi Pesantren: Dari Harmonitas Ke Emansipasi Sosial." *Pesantren* 5(4).
- Eriyanto. 2008. "Konsentrasi Kepernilikan Media dan Ancaman Ruang Publik." *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12(2): 121–50. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10977>.
- Faccarello, Gilbert. 2017. "Sæculum." *The European Journal of the History of Economic Thought* 24(4): 625–39. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09672567.2017.135184>.
- Hanafi, Hassan. 1990. "Asal Usul Konservatisme Modern dan Fundamentalisme Islam." *Ulumul Qur'an* 2(7).
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan Dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. 3rd ed. Yogyakarta: Kanisius.
- Howe, Kenneth R. 1988. "Against the Quantitative-Qualitative Incompatibility Thesis or Dogmas Die Hard." *Educational Researcher* 17(8): 10–16. <http://journals.sagepub.com/doi/10.3102/0013189X017008010>.
- Huda, Sokhi. 2002. "Studi Agama-Agama: Wacana Pengantar Metodologis." <https://www.researchgate.net/publication/321361697>.
- Kellner, Douglas. 2010. *Budaya Media: Cultural Studies, Identitas, dan Politik Antara Modern dan Postmodern*. Yogyakarta: Jalasutra.
- King, and Cuzzrort. 1987. *Kekuasaan Birokrasi, Harta Dan Agama Di Mata Max Weber Dan Emile Durkheim*. ed. Hanindita Graha Widya. Yogyakarta.
- Lewis, Bernard. 1993. *Islam and the West*. Oxford: Oxford University Press.
- Lubis, M. Ridlwan. 1987. "Syura Di Masa Dulu Dan Refleksi Kini." *Pesantren* 6(1).
- Lukmana, Simon. 2017. "Reformation 500: Reformation and Secularism in Society." *Buletinpillar.org*. <https://www.buletinpillar.org/artikel/reformation-500-reformation-and-secularism-in-society#hal-1>.
- McCleary, Rachel M, and Robert J Barro. 2006. "Religion and Economy." *Journal*

- of Economic Perspectives* 20(2): 49–72.  
<https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/jep.20.2.49>.
- . 2019. *The Wealth of Religions: The Political Economy of Believing and Belonging*. New Jersey: Princeton University Press.
- McInner, William. 1990. “Agama Di Abad Duapuluh Satu.” *Ulumul Quran* 2(5).
- McNair, Brian. 2003. *2nd Communication and Society (Routledge (Firm)) News and Journalism in the UK*. London: Routledge.
- . 2009. *News and Journalism in the UK*. 5th ed. London: Routledge.
- Mcquail, Denis. 2011. *Teori Komunikasi Massa Buku 1*. 6th ed. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mosco, Vincent. 2009. *The Political Economy of Communication*. 2nd ed. London: SAGE Publications Ltd.
- Mukhijab et al. 2020. “The Political Games of Media Investors and the Effects of Democracy Health.” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24(7): 9565–78.  
<https://www.psychosocial.com/article/PR270959/19482/>.
- Neuman, W. Lawrence. 2014. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. England: Pearson Education Limited.
- Sudibyo, Agus. 2000. “Absennya Kajian Ekonomi Politik Media Di Indonesia.” *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4(2): 115–34.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11116>.
- . 2009. *Kebebasan Semu: Penjajahan Baru Di Jagat Media*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- . 2010. “Media Dan Politik Lokal: Profesionalisme Dalam Peliputan Pilkada.” *Jurnal Dewan Pers* 3.
- Sulhan, Muhammad. 2006. “Kisah Kelabu Di Balik Maraknya Pers Lokal Di Kalimantan.” *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM* 9(3): 317–35.  
<https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11027>.
- Wahid, Abdurrahman. 1988. “Paradigma Pengembangan Pesantren Melalui Pesantren.” *Pesantren* 3(5).
- Weber, Max. 2009. *From Max Weber Essays in Sociology*. London: Routledge.
- Wirosardjono, Soetjipto. 1987. “Dakwah: Potensi Dalam Kesenjangan.” *Pesantren* 6(4).
- Young, Cristobal. 2009. “Model Uncertainty in Sociological Research: An Application to Religion and Economic Growth.” *American Sociological Review* 74(3): 380–97.  
<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000312240907400303>.
- Yustika, Ahmad Erani. 2014. *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis Dan Analisis Empiris*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaenuddin. 2013. “Islam Dan Studi Agama (Model Pendekatan Studi Agama Menurut Richard C. Martin).” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*.  
<https://www.uin-malang.ac.id/r/131101/islam-dan-studi-agama-model-pendekatan-studi-agama-menurut-richard-c-martin.html>.